

IV. DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. DPW PKS Provinsi Lampung

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera)

menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bersatu dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 – 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 – 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

1. Ideologi PKS

Ideologi secara sederhana dapat dimengerti sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijadikan pedoman normatif kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan dapat memberikan orientasi dan motivasi dalam perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ideologi politik partai politik dapat dipahami sebagai sistem kepercayaan yang memberikan kesadaran pembenaran dan pencerahan mengenai kehidupan politik demi menggalang motivasi, hingga tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan partai politik. Artinya, ideologi dalam partai politik berperan sangat strategis sebagai landasan legitimasi politik yang sekaligus memberi penuntun bagi seluruh kebijakan dan perilaku politik, serta sebagai tali pengikat aktivitas-aktivitas politik.

Perlu dicatat bahwa ideologi hakikatnya merupakan perwujudan perjuangan nilai dalam partai politik untuk ikut memberikan warna terhadap bangunan imajiner sebuah bangsa yang memungkinkan terciptanya segala cita-cita kebangsaan dan kenegaraan. Tetapi, itu semua menjadi sia-sia tatkala asas-asas dan ideologi-ideologi yang tercantum dalam AD/ART partai politik tidak diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari partai politik dan tidak menjadi penuntun bagi perjuangan partai politik.

Berangkat dari kerangka pemikiran tentang universalitas dan integralitas Islam serta keyakinan dari PKS bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individu ataupun sosial, maka ideologi PKS adalah Islam. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa segala pemikiran yang dihasilkan oleh PKS harus menggambarkan ajaran Islam itu sendiri, termasuk pemikiran politiknya. Menurut PKS, sistem dalam Islam akan mampu membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir batin, duniawi dan *ukhrawi*. Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan pribadi (*futuh khasah*) dan kemenangan (*futuh ammah*). Kemenangan pribadi diraih dengan ketakwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketakwaan kolektif. Dakwah yang sistemik yang dilakukan terus-menerus adalah jalan satu-satunya menuju dua kemenangan tersebut. Oleh karena itu menurut salah satu kader, yang ingin ditampilkan oleh kader PKS selama ini adalah dominasi spirit Islam dan berusaha menunjukkan Islam *kaffah*, moderat dan *rahmatan lil alamin* serta mempunyai perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi NKRI dan persoalan umat Islam di dunia.

Lebih jelas lagi tentang ideologi PKS dapat dilihat di keterangan Majelis Syura' PKS tentang Kebijakan Umum Partai yang mengatakan bahwa berangkat dari prediksi akan menguatnya kesadaran politik masyarakat seiring dengan penguatan ideologisasi dalam tubuh partai politik, perlu kiranya terdapat kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan

menguatnya konflik di kalangan aktivis partai, kebijakan dasar tersebut adalah;

1. Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi umat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
2. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT; pembebasan manusia dari *kefajiran* ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam; dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.
3. Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip, yaitu:

Pertama : Kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam,

Kedua : Otoritas syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, dan *ijtihad* (proses kreativitas berpikir).

Ketiga : Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.¹

Langkah politik yang dilakukan PKS dengan pertimbangan di atas untuk menerapkan Islam secara keseluruhan adalah dengan pembangunan sistem, yaitu dengan memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Pembangunan komunikasi politik dipandang perlu, agar orang lain mau berpartisipasi dengan penyadaran umum terhadap pentingnya sistem politik islami sebagai solusi terhadap

¹ www.hidayah.com/pks_siap/[endif/-, ideologi islam. Diunduh pada tanggal 3 Oktober 2012.

persoalan bangsa dan negara, kemudian mengkokohkan kredibilitas dan efektivitas komunikasi antara partai politik dan masyarakat.

Hal ini disimpulkan juga oleh Imdadun Rahmat,² yaitu:

”PKS mengagendakan transformasi ideologi masyarakat dari *ideologi rekaan manusia* menjadi ideologi Islam. Artinya PKS menghendaki ideologi lain, seperti kapitalisme, sosialisme, nasionalisme termasuk ideologi Pancasila, disingkirkan dari pemikiran masyarakat dan digantikan dengan ideologi Islam. Oleh karena itu, tidak mengada-ada jika banyak pihak yang meragukan komitmen PKS terhadap bentuk negara kebangsaan dalam koridor Pancasila.”

Penerapan ideologi Islam ini dirasakan sangat sulit, mengingat terlalu eksklusifnya Islam di tengah masyarakat. Indonesia dengan warga negaranya yang mayoritas Islam dengan berbagai aliran atau paham yang banyak pula akan menjadi kendala serta bukan menjadi jaminan untuk menjadikan negara Islam serta menerapkan *syari'ah* atau hukum Islam di Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas hanya dijadikan simbol saja atau lebih kepada tradisi saja. Alasannya dengan berbagai macam agama dan kepercayaan yang menjadi minoritas serta budaya yang beragam pula.

Pembangunan budaya politik yang menjadi kebijakan umum dari PKS, dengan menokohkan Islam sebagai sumber budaya kehidupan politik, mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik, membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik, serta mengembangkan budaya *hisbah* (mawas diri). Langkah politik di atas

² M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS, dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LkiS, 2002) hal 120

diharapkan mampu membangun partisipasi politik dengan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui PKS.³

Inti pemikiran dari A'la al-Maududi⁴ dijadikan konsep pula oleh Sayyid Quthb yang dianut oleh para kader PKS, bahwa:

“Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam harus dijadikan acuan. Al-Qur’an dan as-Sunnah meski menjadi sumber pokok, baik ideologi negara, sistem pemerintahan, hukum maupun peraturan. Dengan demikian, negara mesti dikelola untuk kepentingan menegakan ajaran Islam. Kekuasaan merupakan milik Allah yang harus dikelola untuk mewujudkan apa yang akan dikehendaki oleh Allah dan harus sesuai dengan ajaran-Nya. Sebab kekuasaan bukanlah milik rakyat (kedaulatan), melainkan milik Allah (kedaulatan Tuhan). Selain itu Allah telah menyediakan perangkat aturan mengelola kekuasaan melalui ajaran Islam. Hak untuk menerjemahkan perangkat aturan adalah wewenang para ulama (*wilayatul faqih*). Dalam konteks ini, para ulamalah yang menggali dan membuat hukum dan aturan dari sumber Al-Qur’an dan as-Sunnah.”

Berdasarkan prinsip dasar ini, ideologi PKS merupakan kontinuitas dari ideologi yang dikembangkan kalangan *tarbiyah* yang sangat berorientasi pada *Ikhwanul Muslimin*, sehingga wajar ideologi *Ikhwanul Muslimin* kental mewarnai PKS. Hal ini juga diakui oleh Abdi Sumaithi (Abu Ridlo)⁵, sebagai deklarator PKS mengemukakan bahwa:

”PKS juga mencoba menyerap, bukan mengadopsi pemikiran *Ikhwanul Muslimin* yang bisa diterapkan di Indonesia, khususnya pemikiran-pemikiran politiknya yang bersifat umum. Islam bersifat universal. Oleh karena itu, PKS memandang bahwa Islam mencakup seluruh bidang kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Konsekuensi berikutnya, semua segmen atau bagian dari kehidupan ini, tidak ada yang lepas dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam harus menjadi acuan utama bagi seluruh kehidupan. Berdasarkan hal ini, tidak ada pemisahan antara politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan nilai-nilai Islam.”

³ Op.cit.

⁴ Op.cit. hal 120-121

⁵ *Ibid*, hal 121

2. Karakter PKS

PKS memiliki 7 karakter yang sama seperti PK⁶, yaitu *Pertama*, *Moralis*, PKS berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya. PK berusaha menampilkan sisi moralis yang bersumber dari nilai-nilai Islam ini sebagai basis dan keteladanan.

Kedua, *Profesional*, profesionalitas bercirikan pada penguasaan detail masalah yang mengantarkan partai pada kebijakan-kebijakan yang tepat dan bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dihadapi, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Pembentukan pribadi dengan memperhatikan intelektualitas, sikap kritis dan sensitivitas mendapatkan perhatian yang penting dalam perhatian partai ini.

Ketiga, *Patriotik*, kehidupan berpartai adalah bentuk kehidupan perjuangan. Sedangkan partai merupakan salah satu dakwah Islam yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam. Karena itu, bagi para kader, berjuang di jalan Allah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani demi tegaknya wibawa umat dan kemanusiaan umumnya.

Keempat, *Moderat*, pemikiran, pandangan dan sikap-sikap moderasi, berimbang dan pertengahan serta saling melengkapi bagi manusia dan kehidupan merupakan sikap yang obyektif dan selaras dengan tata alamiah.

⁶ Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun. Gerakan Tarbiyah di Indonesia, (Bandung: Teraju, 2002), hal 239-256

Kelima, Demokrat, prinsip demokrat adalah penerimaannya terhadap nilai-nilai universal demokrasi sebagai bentuk pengakuan manusia dalam tanggung jawabnya sebagai *khalifatullah*. Salah satu substansinya yaitu partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syura* (musyawarah).⁷

Keenam, Reformis, PK menempatkan posisi sebagai reformis serta berusaha konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan.

Ketujuh, Independen, dengan merujuk pada konteks dakwah seperti yang diucapkan oleh panglima perang Rib'i bin Amir, yaitu membebaskan penghambaan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata, dari kesempitan menuju keluasan dunia-akhirat, serta dari tirani agama menuju tirani Islam.

3. Prinsip Kebijakan PKS

Prinsip kebijakan PKS⁸ sebagaimana ketetapan Majelis Syuro tentang

Kebijakan Dasar PKS adalah:

- a. *Al-Syumuliyah* (Lengkap dan Integral)
Sesuai dengan dakwah Islam yang *syamil*, maka setiap kebijakan partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, memandangnya dari berbagai perspektif serta mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lain.

⁷ *Syura*: sistem yang berkaitan dengan bagaimana cara penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara yang nilainya digali dari Al Qur'an.

⁸ "Ketetapan Majelis Syura' tentang Kebijakan Dasar PKS" DPP PKS hal 4-6

- b. *Al-Islah* (Reformatif)
Setiap kebijakan, program dan langkah yang ditempuh partai selalu berorientasi pada perbaikan (*ishlah*), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat ataupun yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara, dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT, memenangkan *syari'ah*-Nya dan menegakkan *daulah*-Nya.
- c. *Al-Syari'ah* (Konstitusional)
Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia (*hablun min Allah*) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (*hablun min al-naas*). Menjunjung tinggi *syari'ah*, ketundukkan dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap Muslim sebagai konsekuensi keimanannya.
- d. *Al-Wasathiyah* (Moderat)
Masyarakat Muslim disebut sebagai masyarakat “tengah” (*ummatan wasathah*). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (*washathiyah*) dalam sikap dan interaksi Muslim dalam berbagai persoalan. *Al-Wasathiyah* yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek *nazhariyah* (teoritis), dan *amaliyah* (operasional) atau aspek *tarbiyah* (pendidikan) dan *tasyri'iyah* (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun *tashawwur* (persepsi), ibadah, yang bersifat ritual, akhlak, adab, *tasyri'* dan dalam semua kebijakan, program dan perilaku politik PKS. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan bila dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstrimis dan eksagritas kezhaliman dan kebathilan.
- e. *Al-Istiqamah* (Komit dan konsisten)
Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (QS 43:23) merupakan ciri seorang Muslim, maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program dan langkah partai harus *istiqamah* (taat asas) pada “hukum transenden” yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- f. *Al-Numuw wa al-Tathawwur* (Tumbuh dan berkembang)
Konsistensi yang menjadi watak PKS tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreativitasnya yang orisinal. Maka prinsip *Al-Numuw wa al-Tathawwur* (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan berkembang yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam.
- g. *Al-Tadarruj wa al-Tawazun* (Bertahan, seimbang dan proporsional)
Pertumbuhan dan perkembangan gerakan dakwah partai harus dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan *Sunatullah* yang

berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan.

- h. *Al-Awlawiyat wa al-Mashlahah* (Skala prioritas dan prioritas kemanfaatan)
Prinsip *Al-Awlawiyat* dalam gerakan pada hakekatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu, kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan pada visi dan misi partai. PKS yakin bahwa sebaik-baiknya Muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia.
- i. *Al-Hulul* (Solusi)
PKS sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh umat. Partai dan aktivisnya harus mengarahkan aktivitas dan program partai politik untuk menjadi solusi dan merealisasikannya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.
- j. *Al-Mustaqbaliyah* (Orientasi masa depan)
Pada kenyataannya, tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran dakwah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah SWT di bumi yang menyebarkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut.
- k. *Al-'Alamiyah* (Bagian dari dakwah dunia)
Pada hakikatnya dakwah islamiyah, baik tujuan maupun sasaran yang akan dicapai itu bersifat '*alamiyah* (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal ini telah menjadi *sunnatuddakwah*. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi dakwah kita merupakan bagian dari dakwah alamiah.

4. Kader dan Keanggotaan

Perekrutan dan pengkaderan PKS yang mengandalkan gerakan *tarbiyah* ini menunjukkan perkembangan yang pesat. Pada awal berdirinya, partai ini baru memiliki 42.202 kader.⁹ Pada pemilu tahun 1999, jumlah kader PKS di

⁹ M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS, dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hal 39

Indonesia secara keseluruhan mencapai 70.300 kader. Menjelang pemilu 2004 jumlah kader PKS meningkat menjadi sekitar 421.200¹⁰. Kader-kader partai tersebut tersebar di seluruh propinsi di Indonesia dengan Jawa Barat sebagai kantong terbesar kader (59.595 kader). Jawa Tengah menempati tempat kedua dengan 52.793 kader, disusul DKI Jakarta 52.287. Selanjutnya berurutan Sulawesi Selatan dengan 37.909 kader, Maluku: 28.146 kader, DI Yogyakarta: 25.415 kader, Jawa Timur: 16.578 kader, Maluku Utara: 15.552 kader, Sulawesi Tengah: 12.047 kader, Banten: 11.632 kader dan Lampung: 10.386 kader. Selebihnya kader tersebar di propinsi lain dengan kisaran jumlah di bawah 10.000 hingga 300-an kader. Berdasarkan jumlah kader tersebut, kader inti hanya sekitar 25.000 orang, dan sisanya merupakan kader biasa. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang menyumbang jumlah kader PKS cukup banyak, yaitu sekitar 24.000 kader.

4.1 Keanggotaan PKS

Syarat untuk menjadi kader partai ini tercantum dalam Kebijakan Dasar PKS. Dalam praktisnya tidak jauh berbeda dengan peraturan yang sudah diberlakukan, yaitu setiap warga negara Indonesia dengan syarat (Pasal 1 dan 2)¹¹:

- a. Laki-laki maupun perempuan.
- b. Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah.
- c. Berkelakuan baik.
- d. Setuju dengan visi, misi, dan tujuan partai.
- e. Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada Sekretariat Pusat melalui Dewan Pengurus Daerah.
- f. Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan.
- g. Mengucapkan janji setia pada prinsip-prinsip dan disiplin partai,

¹⁰ Yon Machmudi, Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Politik Islam Indonesia, (Bandung: Harakatuna, 2006), hal 29

¹¹ DPP PKS, Peraturan Kebijakan Dasar PKS. hal 3.

sesuai dengan jenis atau jenjang keanggotaannya.

4.2 Hak dan Kewajiban Kader

Kader PKS memiliki kewajiban dan hak. Hak dan kewajiban kader menurut peraturan Kebijakan Dasar PKS yaitu:

4.2.1 Hak-Hak Umum Anggota :

- a. Hak takaful (sepenanggungan) dan tadhamun (solidaritas) dari partai dan dari sesama anggota sesuai dengan perintah Islam.
- b. Hak mengemukakan pendapat sesuai dengan adab Islami dan tertib struktural.
- c. Hak mengajukan inisiatif dan kreasi dalam berbagai bentuk usulan.
- d. Hak menuntut hak, membela diri, mengajukan perkara dan naik banding.

4.2.2 Hak-Hak Khusus Anggota :

- a. Hak-hak khusus Anggota Pemula adalah sebagai berikut:
 - Hak ikut dalam acara-acara resmi kepartaian tingkat cabang.
 - Hak ikut dalam pelatihan-pelatihan kepartaian.
 - Hak memperoleh kartu anggota.
- b. Hak-hak khusus Anggota Muda adalah sebagai berikut:
 - Hak ikut dalam acara-acara resmi kepartaian tingkat daerah.
 - Hak ikut dalam pelatihan-pelatihan kepartaian.
 - Hak memperoleh kartu anggota.
- c. Hak-hak khusus Anggota Madya, Dewasa, Ahli dan Purna adalah sebagai berikut:
 - Hak ikut serta dalam pemilihan dan pencalonan pada berbagai lembaga dan badan-badan partai.
 - Hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan partai, bersuara dalam pengambilan keputusan-keputusan lembaga di mana ia ada di dalamnya.
 - Hak memberikan nasihat, mengkritik, mengevaluasi, mengemukakan pendapat dan usulan secara bebas merdeka.
 - Hak perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan atau kemudlaratan, atau perlakuan zhalim yang

- menimpa anggota yang disebabkan karena mengemukakan pendapat, atau melaksanakan tujuan dan arahan partai.
- Hak memperoleh pembelaan terhadap dirinya di depan Dewan Syariah dan di depan peradilann umum.
- Hak memperoleh kartu anggota.
- d. Hak-hak khusus anggota kehormatan adalah sebagai berikut:
 - Hak ikut serta dalam acara-acara resmi yang dilaksanakan partai.
 - Hak mengajukan saran dan usul baik diminta atau tidak.
 - Hak memperoleh kartu anggota.

4.2.3 Kewajiban Anggota :

- a. Dalam segala aktivitasnya senantiasa bertolak dari perspektif nilai-nilai moral, keadilan dan kebenaran universal.
- b. Berpegang teguh pada pemahaman partai terhadap Islam yang berlandaskan Kitab dan Sunnah dan yang telah dijabarkan dalam Ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.
- c. Mengikuti program pembinaan keislaman yang diselenggarakan oleh partai.
- d. Melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip partai dari segala usaha yang mendiskreditkan dengan cara yang dibenarkan sejauh kemampuannya.
- e. Menjadi contoh dalam berkorban demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan, melindungi dan membela tanah air dan kemerdekaannya, menjaga kesatuan dan persatuan.
- f. Bekerja keras memperkuat kedudukan Partai, mewujudkan tujuan dan cita-citanya.
- g. Komitmen dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dalam sikap dan perilaku.
- h. Berusaha secara sungguh-sungguh merealisasikan program-program partai.
- i. Komitmen dengan pertemuan-pertemuan partai.
- j. Berusaha secara sungguh-sungguh menyatukan unsur-unsur bangsa dan memantapkan persaudaraan antar mereka.
- k. Membiasakan bermusyawarah sebagai kepribadian, menghormati pendapat orang lain, komit men dengan pendapat mayoritas, melaksanakan keputusan-keputusan pimpinan, dan mematuinya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partai.
- l. Berusaha memperkuat hubungan Partai dengan rakyat dan bekerja untuk memperoleh pen dukung.
- m. Menghindari sikap, perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan Partai.
- n. Menjaga dan melindungi serta menjamin amanah yang dipercayakan kepadanya.

- o. Menjaga dan memelihara keamanan Partai serta sarana-sarana yang dimilikinya.
- p. Berpegang teguh kepada peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan sikap-sikap partai terhadap permasalahan umum..
- q. Secara teratur membayar iuran bulanan atau tahunan sesuai dengan aturan keuangan partai.
- r. Menyerahkan iuran, infaq dan shadaqah hartanya kepada partai.
- s. Berusaha mencari pembiayaan partai dalam bentuk sumbangan, wasiat, waqaf dan lain sebagainya.

5. Visi

PKS Provinsi Lampung mempunyai visi¹², *“Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”*

6. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan DPW PKS¹³ adalah

“Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.”

7. Struktur

Struktur Badan Pengurus Harian DPW Lampung berlaku untuk masa jabatan 2010-2015, yang dapat dilihat pada bagan berikut:

¹² <http://www.pkslampung.org/?p=282>, visi dan misi DPW PKS, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2012.

¹³ ibid

B. Proses Rekrutmen PKS

Semua kegiatan rekrutmen dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat. Hanya saja bentuk komunitasnya dan lembaga sebagai wadahnya yang berbeda, yaitu sesuai pada profesi masyarakat itu sendiri. Pembagian lapisan serta profesi masyarakat dalam lembaga tersebut terdiri dari¹⁴ :

1. Rekrutmen pada Mahasiswa
Pola ini dengan menarik mahasiswa untuk bergabung organisasi yang sudah menjadi formal di universitas-universitas di wilayah, yaitu dalam LDK atau Lembaga Dakwah Kampus. LDK memiliki kegiatan rutin tahunan yang selalu menjadi ajang silaturahmi di antara komponen lembaga dakwah kampus di Indonesia.
2. Rekrutmen pada Siswa
Siswa di sini yaitu bagi mereka yang umumnya mendekati sebagai pemilih pemula yang belum stabil pada jati diri mereka, sehingga mereka dapat dibina. Lembaga yang sudah menjadi formal di sekolah-sekolah baik itu SMP sampai pada SMA, yaitu ekstrakurikuler Rohis (Rohani Islam), Gugus Tunas Dakwah Sekolah (GTDS) serta kelompok kesenian Nasyid yang mulai ramai digemari oleh para siswa.
3. Rekrutmen pada keluarga miskin
Rekrutmen yang dilakukan yaitu dengan membuat lembaga sosial guna membantu keluarga miskin dalam hal kesehatan dan pendidikan murah sampai gratis.
4. Rekrutmen pada keperempuanan
Hal ini dengan maksud menampung aspirasi para kaum perempuan dalam bidang sosial seperti dalam pengajian Salimah serta Pos Wanita Keadilan untuk kegiatan peduli masyarakat. Selain aktif dalam liqo', kaum perempuan PKS yang aktif dalam Salimah serta Pos Keadilan biasanya mengadakan seminar mengenai keperempuanan seperti KB, kanker rahim dan sebagainya.
5. Rekrutmen pada pengusaha kecil dan menengah
Pada profesi ini, ditampung dalam lembaga Serikat Pekerja Keadilan (SPK) serta Koperasi Syari'ah Indonesia untuk simpan pinjam pengusaha kecil.

¹⁴ <http://www.mail-archive.com/assunnah@yahoo.com/msg06498.html>, proses rekrutmen, diunduh pada tanggal 4 Desember 2012.

6. Rekrutmen pada pemuda

Ada beberapa lembaga yang menjadi wadah untuk para pemuda yang aktif di tengah masyarakat, antara lain Garda Keadilan serta yayasan pemuda dan pelajar.

Rekrutmen pada mahasiswa berdasarkan dalam LDK (Lembaga Dakwah Kampus) seperti yang terdapat dalam kampus UNILA. Salah satu program yang strategis bagi perekrutan kader dakwah yaitu Bimbingan Belajar Qur'an (BBQ sebuah kuliah wajib tambahan mata kuliah agama Islam yang dikelola LDK). Model rekrutmen BBQ juga terdapat di kampus yang lain dengan nama yang berbeda, misalnya di UGM bernama Asistensi Agama Islam.

Model BBQ sangat mirip dengan sel-sel pembinaan (Halaqoh) yang kemudian di-istilahkan dengan liqo di gerakan Ikhwanul Muslimin. Materi BBQ biasanya berisi materi dasar seperti Mengenal Allah, Mengenal Rasul, Makna Syahadat dan tajwid-tajwid Qur'an.

Pada awal perkembangannya, Ikhwanul Muslimin adalah gerakan sosial keagamaan yang bertujuan memperbaiki kondisi moral spiritual dan sosial masyarakat Mesir pada waktu itu pun dimaksudkan untuk menandingi efektivitas misionaris Kristen yang makin marak. Problematika politik dan sosial Mesir karena pengaruh peradaban Barat dan kolonialisme membuat masyarakat Mesir semakin jauh dari sendi-sendi ajaran Islam. Al Banna memandang usaha membawa masyarakat kembali kepada naungan Islam, perlu dilakukan. Di sinilah kemudian Ikhwanul Muslimin berkembang pesat sebagai jawaban atas merosotnya nilai-nilai moral, sosial dan politik masyarakat Mesir.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan dengan unsur gabungan antara kekuatan moral-spiritual, akademik dan aktivitas sosial. Karakter dasar di atas menjelaskan sedikit-banyak adanya pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap PKS, di antaranya adanya kesamaan pada tujuh karakter PKS sendiri yang terdiri dari Moralitas, Profesional, Patriotik, Moderat, Demokrat, Reformis dan Independen. Terlebih lagi dengan adanya persiapan kualitas kader untuk ke depannya, yang telah dibahas sebelumnya, kesamaan terdapat pada pemikiran Hasan Al Banna, seperti risalahnya:

“Kami menginginkan jiwa-jiwa yang hidup, kuat dan selalu muda. Hati yang baru, yang senantiasa berkibar-kibar dan ruh yang selalu menggelora dan terobsesi untuk menuju cita-cita yang tinggi”¹⁵.

Disadari atau tidak, peran sosial dan politik Ikhwanul Muslimin kemudian membuat organisasi ini semakin mendapatkan pengaruh yang luar biasa di Mesir. Sebagaimana konsep awal, organisasi ini yang melihat Islam sebagai ajaran yang melingkupi semua aspek keagamaan maka perluasan peran pada ranah politik, walaupun tidak berbentuk partai politik formal, tidak bisa dihindari. Kemampuan Ikhwanul Muslimin dalam mengorganisasi dan memobilisasi massa menempatkannya sebagai kekuatan politik yang disegani.

Rekrutmen pada siswa terdapat lembaga di luar sekolah yaitu bimbingan belajar seperti Nurul Fikri, sebagai bimbingan belajar dengan memasukkan

¹⁵ Ismail, 1998. Jati Diri Partai Keadilan. Jakarta.

muatan Islam, seperti menghimbau memakai jilbab bagi yang Muslim, kelas laki-laki dan perempuan yang dipisah, adanya Bimbingan Informasi Pendidikan (BIF) yang memasukkan semangat serta nilai-nilai agama Islam, memasukan materi pelajaran keagamaan sampai pada mengadakan shalat wajib berjamaah.

Rekrutmen pada keluarga miskin terdapat lembaga-lembaga di antaranya Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) untuk bantuan pinjaman dana serta Bulan Sabit Merah Indonesia untuk layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan seperti ini, masyarakat indonesia mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang layak, terutama pada masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai. Lembaga sosial kegiatan seperti ini dapat merekrut pada keluarga miskin dan menjadi kader-kader atau menjadi simpatisan pada Partai Keadilan Sejahtera.

Perempuan PKS telah lama bergerak di akar rumput melakukan upaya peningkatan kapasitas perempuan dan keluarga. Salah satunya adalah melalui wadah Pos Wanita Keadilan (Pos WK). Sejak tahun 2011, Pos WK memantapkan fokus kerja pada dua aspek dasar peningkatan ketahanan keluarga, yaitu pendidikan dan ekonomi.

Sejak awal tahun 2012, Pos Wanita Keadilan (Pos WK) dengan Program Nasionalnya Pos Wanita Keadilan Berbasis Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi (Pos WK PPE) memantapkan fokus kerja pada dua aspek dasar

peningkatan ketahanan keluarga, yaitu pendidikan dan ekonomi. Pada Desember 2011, Pos WK PPE telah terbentuk di 33 Provinsi di Indonesia, dengan jumlah titik yang melampaui target, yaitu 1606 (1082 titik fokus pendidikan dan 524 titik fokus ekonomi). Sementara jumlah titik Pos WK di luar fokus pendidikan dan ekonomi di Indonesia ada 2407. Dengan demikian, total ada 4013 titik Pos WK di seluruh Indonesia.

Mengacu pada kondisi dan situasi keluarga-keluarga Indonesia saat ini, di mana angka kemiskinan di Indonesia mencapai 76 juta kepala keluarga Indonesia dan 20 juta kepala keluarga berada di bawah garis kemiskinan, maka Pos WK dan Pos WK PPE sejak awal 2012 dikembangkan menjadi Pos Ekonomi Keluarga (Pos EKa) yang lebih memfokuskan pada aspek ekonomi.

Adapun kegiatan Pos EKa adalah melakukan pendampingan usaha oleh tenaga ahli, melakukan pelatihan keterampilan bekerjasama dengan mitra setempat, dan pembentukan usaha barang dan jasa. Sasaran kegiatan-kegiatan Pos EKa adalah meningkatkan kesadaran perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya; meningkatkan peluang usaha dan kerja bagi perempuan dan keluarga; dan meningkatkan peran, partisipasi perempuan dan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Rekrutmen pada pengusaha kecil dan menengah dalam lembaga serikat Pekerja Keadilan sejak tahun 1998 dan rekrutmen pada pemuda yaitu lembaga Garda

Keadilan. Dengan adanya rekrutmen seperti ini, akan dibentuk kader-kader yang dibina dan diberi materi sesuai dengan ideologi serta visi dan misi partai. Semua jenis rekrutmen ini berorientasi menjadi pintu masuk bagi calon kader untuk menjadi peserta tarbiyah level pemula. Pengkaderan formal partai dilakukan secara resmi oleh kepengurusan partai dari Dewan Pengurus Ranting (DPRa) hingga Dewan Pengurus Pusat (DPP). Pengkaderan formal sebagai organisasi induk ini terdiri dari TOP (Training Orientasi Partai) dan Ta'lim Rutin Partai (TRP) yang dilakukan setiap pekan. Tahap selanjutnya berupa pelatihan-pelatihan untuk kader yang dikeluarkan dari tingkat cabang sampai pada pusat seperti Training For Trainer sebagai training untuk para murabbi pada tingkat tinggi dengan tujuan meningkatkan kualitas kader. Pengkaderan formal ini merupakan sarana pembinaan kader sekaligus penjenjangan bagi mereka yang akan berimplikasi pada distribusi peran dan posisi struktural di PKS.